

TOL SOLO-YOGYA SAMPAI KULONPROGO

Tiga 'Exit Tol' di Sentolo, Wates dan Temon

KULONPROGO (KR) - Jalan Tol Solo-Yogyakarta nantinya tidak hanya terkoneksi dengan Tol Yogya-Bawen, namun juga tersambung ke jalur Tol Yogya-Kulonprogo. Rangkaian proyek pembangunan Jalan Tol Solo-Yogya-Kulonprogo sepanjang 96,574 kilometer (km) yang menghubungkan tujuh kabupaten di Jawa Tengah dan DIY tersebut segera dimulai.

Direktur Teknik PT Jalan Tol Solo Yogyakarta YIA Marga Makmur, Pristi Wahyono mengatakan, pembangunan ruas jalan tol tersebut dibagi menjadi tiga seksi pembangunan dengan pembebasan lahan dan rencana konstruksi. Seksi 1 (SS Kartasuro-SS Purwomatani) pada November 2020-Juni 2023, Seksi 2 (SS Purwomatani-SS Gamping) pada Mei 2021-Juni 2024, dan Seksi 3 (SS Gamping-Exit Purworejo) pada Juli 2022-Desember 2024.

“Saat ini tiga kabupaten di Jawa

Tengah sudah pemberkasan dan inventarisasi. Karanganyar dan Boyolali pada tahap pematokan dan mulai pengukuran bidang oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Klaten masih menunggu penetapan lokasi (penlok),” katanya saat audiensi dengan Bupati Kulonprogo Sutedjo bersama jajarannya di Ruang Rapat Menoreh, Jumat (18/9).

Hadir perwakilan Konsorsium PT Daya Mulia Turangga, PT Gamma Group, PT Jasa Marga (Perse-

sero) Tbk, Asisten Setda II Bidang Perekonomian dan Pembangunan dan Sumber Daya Alam Bambang Tri Budi Harsono, Kepala Dinas PUPKP Gusdi Hartono serta Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (PTR) R Heriyanto.

Pristi Wahyono mengungkapkan, ada dua teknik pembangunan ruas Jalan Tol Solo-Yogya. Dari total 60 km, sebanyak 15 km dibangun di atas tanah. Sementara sisanya, sekitar 45 km dibangun melayang.

Gusdi Hartono minta pihak konsorsium segera memberi kejelasan *trase* serta *schedule rigid* atau jadwal baku agar Pemkab Kulonprogo bisa mempersiapkan sosialisasi kepada masyarakat sekaligus berkoordinasi dengan semua pihak, mengingat dampak tol tidak sedikit. Hal tersebut juga berkaitan dengan pembangunan *exit tol* di wila-

yah Sentolo, Wates dan Temon.

“Masyarakat sudah sering minta informasi *trase*. Kapan kira-kira penlok keluar? Jadi kami sudah boleh mensosialisasikan, mempersiapkan sebagainya. Dampak dari tol jauh lebih hebat dari Bandara Internasional Yogyakarta karena memang dari ujung ke ujung wilayah Kulonprogo,” tegas Gusdi.

Sutedjo berharap kehadiran Tol Solo-Yogya-Kulonprogo tidak mematikan akses jalan publik. Mengikuti kebijakan yang sudah ditentukan, dalam proses pembangunan hendaknya memanfaatkan potensi yang ada di Kulonprogo.

“Kami minta konsorsium mengakomodasi yang telah kami sampaikan dengan mempertimbangkan substansi yang ada. Sesuai kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibangun sejak awal,” harap Bupati Kulonprogo. **(Rul)-f**

TERBITKAN PERATURAN MENTERI Kemenhub Dukung Keselamatan Pesepeda

JAKARTA (KR) - Semakin maraknya penggunaan sepeda akhir-akhir ini mendorong Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengeluarkan peraturan menteri aturan terkait penggunaan sepeda. Peraturan Menhub No PM 59 Tahun 2020 Tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan resmi ditetapkan per 14 Agustus 2020 untuk mewujudkan tertib berlalu lintas dan menjamin keselamatan penggunaan sepeda di jalan.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi menyatakan, PM 59/2020 ini ada beberapa aspek utama yang diatur. Salah satunya persyaratan teknis sepeda, dimana sepeda digolongkan menjadi dua kategori yakni sepeda untuk kepentingan umum dan kepentingan olahraga. “Kalau untuk kepentingan umum dapat digunakan sehari-hari oleh masyarakat. Ke depannya kami mengharapkan, sepeda ini dapat digunakan untuk kepentingan sehari-hari masyarakat seperti ke sekolah, kantor, pasar atau ke mal,” jelas Budi Setiyadi di Jakarta, Jumat (18/9).

Ada tujuh jenis persyaratan keselamatan yang harus dipenuhi pesepeda saat di jalan. Persyaratan tersebut, yaitu spakbor, bel, sistem rem, lampu, alat pemantul cahaya berwarna merah, alat pemantul cahaya roda berwarna putih atau kuning dan pedal.

Dalam PM 59/2020 disebutkan, penggunaan spakbor dikecualikan untuk jenis sepeda balap, sepeda gunung dan jenis sepeda lain. **(Imd)-d**

PILKADA, PERKETAT PROTOKOL KESEHATAN

Undian Nomor, Paslon Jangan Bawa Rombongan

YOGYA (KR) - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 yang dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19, membutuhkan perhatian khusus. Salah satu hal yang paling krusial adalah mengantisipasi adanya kerumunan massa, karena bisa memicu terjadinya penularan Covid-19. Untuk itu masing-masing daerah harus bertanggung jawab atas terlaksananya Pilkada dengan sukses tanpa menimbulkan klaster baru penularan Covid-19.

“Saat ini yang harus digarisbawahi adalah jadwal penetapan pasangan calon pada 23 September nanti, pengundian nomor urut, dan kampanye selama 71 hari. Intinya kami meminta semua pihak untuk menyampaikan kepada pasangan calon (Paslon), kepada Tim Kampanye Parpol, dan seterusnya, untuk sama-sama menjaga dan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara ketat,” kata Ketua Komisi Pemilihan

Umum (KPU) DIY Hamdan Kurniawan usai mendampingi Wakil Gubernur DIY Paku Alam X mengikuti video conference dengan Menko Polhukam Mahfud MD di Ndalem Ageng, Kepatihan, Yogyakarta, Jumat (18/9).

Menurut Hamdan, untuk mengantisipasi terjadinya kerumunan saat Pilkada, pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait. Harapannya Pilkada bisa berjalan dengan baik dan mengedepankan protokol kesehatan sesuai perintah dari Pemerintah Pusat. Pihaknya juga sudah melakukan sosialisasi kepada parpol, Satgas DIY, Polda, Bawaslu dan wartawan terkait Peraturan KPU No 6 dan perubahannya, yang berisi tentang aturan protokol kesehatan pada pelaksanaan Pilkada 2020.

“Semua sudah kami lakukan, tinggal atur agar semuanya berlangsung dengan baik. Khususnya terkait pengundian nomor urut supaya

tiga kabupaten di DIY nanti bisa menyampaikan bahwa paslon tidak perlu membawa rombongan atau massa. Sebaliknya, hanya pihak-pihak yang memang terlibat dalam pengundian saja yang diundang dan turut hadir, yang lain tidak perlu, sehingga tidak ada kerumunan,” tegas Hamdan.

Komandan Korem 072/Pamungkas Brigjen TNI Ibnu Bintang Setiawan menyatakan, TNI siap untuk mendukung ketertiban pelaksanaan Pilkada. Baik ketertiban dari permasalahan-permasalahan selama Pilkada berlangsung, maupun ketertiban pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Pihaknya bersama Polda akan berupaya meminimalisasi risiko-risiko yang mungkin terjadi selama pelaksanaan Pilkada. Termasuk berperan aktif untuk memberikan pemahaman pada masyarakat agar risiko penularan Covid-19 bisa benar-benar ditekani. **(Ria)-d**

BERI PELATIHAN BISNIS MIKRO

BPD DIY Sosialisasikan Kredit PEDE



KR-Istimewa

Pelatihan MBS anggota Paguyuban Gandeng Gendong Mrican Makmur.

YOGYA (KR) - Bank BPD DIY turut menumbuhkan kembali perekonomian masyarakat di tengah pandemi Covid-19, antara lain melalui Kredit Pemberdayaan Ekonomi Daerah (PEDE) dan pelatihan Micro Business Simulation (MBS). Kegiatan ini diberikan kepada pelaku usaha ultra mikro anggota Paguyuban Gandeng

Gendong Mrican Makmur Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta.

Pemimpin Cabang BPD DIY Senopati Sumarno mengatakan, Kredit PEDE diberikan untuk merangkul sektor ultra mikro agar bisa naik kelas dengan pembiayaan tanpa jaminan. Kredit PEDE memiliki plafon maksimal Rp 2,5 juta. “Bunga yang dikenakan

3 persen pertahun dan jangka waktu maksimal 12 bulan,” kata Sumarno, Jumat (18/9).

Sumarno mengungkapkan, sejalan dengan Kredit PEDE, pelatihan MBS juga diberikan untuk kelompok nasabah mikro. Pelatihan ini membahas cara menjalankan usaha skala kecil atau mikro dengan memperhatikan kaidah yang baik.

“Artinya peserta pelatihan diajarkan untuk bertindak sebagai pemilik usaha yang mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan bisnis dan mencari solusi atas usahanya,” terang Sumarno.

Sumarno mengatakan, Bank BPD DIY memberikan perhatian terhadap pemberdayaan ekonomi daerah yang selama ini banyak ditopang UMKK dan ultra mikro. **(Aha)-d**

DJOKO DWIYANTO TUTUP USIA

DIY Kehilangan Katalisator Pengembangan Kebudayaan

YOGYA (KR) - DIY berduka, kehilangan sosok katalisator, pengikat yang mencurahkan dan mendedikasikan hidupnya bagi pengembangan kebudayaan, yakni Drs Djoko Dwiyanto MHum yang tutup usia sekitar pukul 10.00 WIB, Jumat (18/9). Kabar duka tersebut disampaikan langsung dari handphone milik almarhum, ke beberapa WhatsApp Group sehingga cukup mengejutkan.

Ketua Dewan Kebudayaan DIY tersebut meninggal di usia 67 tahun, dalam perjalanan dari rumah di Purwokerto Karangmojo RT 06 RW 03 Purwomartani, Kalasan, Sleman, menuju Rumah Sakit Islam Yogyakarta (RSIY) PDHI Kalasan. Jenazah langsung dimakamkan di pemakaman keluarga, Sireap Giri Purna, Kokap, Kulonprogo sekitar pukul 16.00 WIB.

Adik almarhum, Joko Hastaryo yang juga Kepala Dinkes Sleman mengatakan,



KR-Franz Boedisoeakamanto

Djoko Duiyanto

Dinas Kebudayaan DIY (2008-2010) dan Ketua Dewan Kebudayaan DIY (2014-2018) dan (2020-2022).

Seniman Bambang Paningron menyatakan, almarhum merupakan orang yang berdedikasi tinggi di bidang pengembangan kebudayaan. Suwarno Wisetrotomo, seniman sekaligus kurator menegaskan, almarhum merupakan sosok katalisator, pengikat atau jembatan komunikasi antarkomponen. **(Ira)-d**

KASUS DJOKO TJANDRA KE MEJA HIJAU

Pinangki Disidangkan 23 September

JAKARTA (KR) - Sidang perdana perkara dugaan korupsi dan pencucian uang untuk membantu pengurusan fatwa buronan Djoko Soegiarto Tjandra yang menyerjat jaksa Kejaksaan Agung (Kejagung) Pinangki Sirna Malasari siap digelar 23 September mendatang. Humas Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat Bambang Nurcahyono membenarkan hal itu dan menandakan dalam sidang perdana tersebut agendanya pembacaan dakwaan.

“Setelah berkoordinasi dengan majelis hakim yang akan menyidangkan perkara ini, sidang pertama dilangsungkan Rabu, 23 September 2020,” jelas Bambang kepada wartawan di Jakarta, Jumat (18/9).

Mengenai majelis hakim yang telah ditunjuk untuk menyidangkan perkara ini, yakni hakim IG Eko Purwanto sebagai ketua majelis hakim. Sedangkan anggota majelis masing-masing hakim Sunarso dan Agus Salim. Untuk panitera pengganti adalah Yuswardi.

Sebelumnya, Jaksa Pinangki telah ditetapkan sebagai tersangka karena

diduga terlibat dalam kasus perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Kasus tersebut diduga terkait Peninjauan Kembali (PK) tersangka Djoko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra.

Sehubungan hal itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Hari Setiyono mengatakan, tim jaksa penuntut umum (JPU) pada Direktorat Penuntutan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung bersama tim JPU dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah melimpahkan berkas Pinangki dalam perkara Tipikor dan TPPU ke pengadilan Tipikor Jakarta di PN Jakarta Pusat.

Kejagung menduga Pinangki bersama-sama dengan advokat Anita Kolopaking dan pengusaha Andi Irfan Jaya telah membantu buronan terpidana korupsi Cessie Bank Bali Djoko Tjandra. Bantuan tersebut diduga terkait pengurusan fatwa hukum Djoko Tjandra kepada MA melalui perantaraan Kejagung. Diduga bantuan tersebut bertujuan

agar kasus pidana terhadap Djoko Tjandra berdasarkan putusan Peninjauan Kembali sejak 11 Juni 2009 tidak jadi dilaksanakan atau dieksekusi.

Sebagaimana diberitakan, Pinangki, Anita dan Andi Irfan melakukan pertemuan dengan Djoko Tjandra di The Exchange 106 Malaysia pada November 2019. Dalam pertemuan tersebut, Djoko meminta bantuan terkait pengurusan fatwa hukum kepada MA.

Pinangki disangkakan melanggar pasal 5 ayat 2 jo pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor. Pinangki juga disangkakan telah melanggar pasal 3 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan pasal 15 juncto pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 15 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 88 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)). **(Ful)-f**

Tak Akan

Oleh karena itu, masyarakat yang memiliki gejala seperti demam, batuk maupun sesak napas diimbau segera ke fasilitas layanan kesehatan terdekat. Jika ternyata diketahui positif Covid-19, tidak perlu khawatir berlebihan karena akan segera mendapatkan perawatan. Sedangkan yang mengalami kriteria orang tanpa gejala (OTG), solusinya ialah disiplin dalam menjalankan isolasi mandiri supaya tidak menularkan kepada orang lain.

Terkait pemanfaatan shelter bagi pasien OTG, menurut Haryadi, akan ditentukan secara selektif. Tidak semua pasien OTG akan secara otomatis dikirim ke shelter melainkan harus ada rekomendasi dari berbagai aspek. “Kalau semua masuk ke sini maka kapasitas langsung penuh, tidak akan mencukupi. Posisi sekarang konfirmasi positif ada 97 orang, dan 80 orang di antaranya merupakan OTG. Padahal di sini hanya terdapat 42 unit,” urainya.

Selama berada di shelter, pasien OTG juga wajib mengikuti protokol yang cukup ketat. Selain dilarang merokok, mereka juga tidak diperbolehkan dijen-

guk atau mendapat kiriman apa pun koleganya. Semua kebutuhan akan dipenuhi oleh tim gugus tugas mulai dari makanan sehari-hari, asupan vitamin, pengecekan kesehatan dan lainnya. “Tidak semua orang bisa masuk kawasan sini. Kami pun berterima kasih kepada warga sekitar yang telah memberikan ruang ini sebagai shelter,” tandasnya.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogya Emma Rahmi Ariyani, menambahkan pasien OTG yang sudah terkonfirmasi dari puskesmas akan dikoordinasikan dengan wilayah. Jika di sana tidak ada tempat yang representatif untuk isolasi mandiri, maka direkomendasikan menempati shelter di Bener Tegalorejo. Akan tetapi, yang bersangkutan harus tanpa paksaan atau bersedia. Hal ini supaya selama isolasi di shelter mampu menerapkan tata tertib yang sudah dibuat.

“Pihak puskesmas yang nanti akan mengantarkan ke shelter. Begitu tiba di lokasi, pasien OTG akan memperoleh kebutuhan pribadi seperti handuk, alat mandi, vitamin, madu dan lainnya. Mereka hanya cukup membawa pakaian

ganti,” jelasnya.

Kasus positif Covid-19 di DIY mempunyai tren kecenderungan terus mengalami kenaikan signifikan yang kali ini bertambah 53 kasus sehingga total kasus terkonfirmasi tembus menjadi 2.037 kasus. Sebagian besar tambahan kasus terkonfirmasi ini mempunyai riwayat awal dari hasil tracing kontak kasus positif Covid-19.

Sedangkan kasus sembuh pun bertambah sebanyak 31 kasus maka total kasus sembuh di DIY menjadi 1.471 kasus. Data tersebut dari hasil laporan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten/Kota dan Rumah Sakit (RS) Rujukan Covid-19 di DIY.

Juru Bicara (Jubir) Pemda DIY untuk penanganan virus Korona Berty Murtiningsih mengatakan hasil pemeriksaan laboratorium dan terkonfirmasi positif Covid-19 terdapat tambahan 53 kasus positif yang tercatat sebagai kasus 1.990 sampai dengan 2.042 kasus. Kasus terkonfirmasi yang baru tersebut berdomisili Sleman 29 orang, disusul Kota Yogyakarta 16 orang, Bantul 5 orang dan Kulonprogo 3 orang. **(Dhi/Ria/Ira)-d**

Pilkades

Sedangkan di Kalurahan Sumberagung, Duldjiman yang merupakan seorang ayah, akan bersaing memperebutkan suara dengan putrinya sendiri Agustin Dwiaryani. “Ada calon Kades Titis Sukatni dan Edy Utomo merupakan kakak beradik kandung, yang sama-sama maju dalam Pilkades di Kalurahan Sidoagung, Kapanewon Godean,” terang Budiharjo, Minggu (13/9).

Budiharjo menambahkan, di Kapanewon Cangkringan Amino Fajar Nugroho menjadi calon Kades di Kalurahan Kepuharjo. Ia akan bersaing dengan ayah kandungnya sendiri, sang petahana Heri Suprpto. Menurut Budiharjo, mereka semua sudah lolos persyaratan dan telah ditetapkan sebagai bakal calon lurah. Tercatat, pada 2020 ini, Pilkades di Sleman akan diikuti oleh sebanyak 49 Desa. Proses pemungutan suara membutuhkan 1.102 TPS dengan jumlah pemilih sebanyak 457.000 orang.

Amino mengatakan, ia maju dalam persaingan Pilkades dikarenakan dorongan dari teman-temannya di internal Karang Taruna. Amino menerangkan, ia sudah bertemu dengan ayahnya dan menyampaikan hal tersebut. Ayahnya juga tidak mempermasalahkan hal tersebut. “Persaingan dengan bapak

bukanlah masalah berarti. Karena sudah sama-sama tahu dan sepakat berkompetisi. Saya juga tidak mempersiapkan strategi khusus untuk bisa memenangkan percaturan Pilkades ini,” beber Amino.

Dihubungi terpisah, Sosiolog dari UGM, Dr Arie Sujito mengemukakan bahwa sebelumnya tidak ada yang salah dengan perebutan jabatan kepala desa oleh sesama keluarga. Karena tidak ada prosedur yang dilanggar. Tapi kenapa hal itu terjadi, karena dari sisi daya tarik kepala desa, memang menarik. Yakni sebagai pemimpin desa, manajer desa dan punya kewenangan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Dengan daya tarik yang luar biasa tersebut, maka menimbulkan keraguan jika nantinya biaya yang harus dikeluarkan dalam pemilihan nantinya jika melawan calon yang lebih kuat, seperti petahana. Ini mengesankan ekonomi politik sudah seperti di Pilkada. “Bahkan ada yang *ngeper*, balik tidak jadi maju, karena secara hitungan, akan kalah dan biaya yang dikeluarkan terlalu besar,” ujarnya.

Sedangkan dari pihak petahana, karena tidak ada calon yang melawannya, maka menyiapkan calon lain yang masih keluarga sendiri. **(Jdm/Aha/Jon)-f**